

IMPLEMENTASI CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PT. AGUNG PERDANA DALAM MENGURANGI DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN (STUDY KASUS DESA PADANG LOANG, SEPPANG DAN DESA BIJAWANG KEC. UJUNG LOE KAB. BULUKUMBA)

AL-Muhajir Haris

Program Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: almuhajirharis@gmail.com

ABSTRAK

CSR merupakan kegiatan perusahaan dalam mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif pada masyarakat, ekonomi dan lingkungan. Keterlibatan perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR merupakan tuntutan dalam tanggung jawab atas dampak kerugian yang dialami masyarakat khususnya pada kerusakan lingkungan. Kegiatan CSR pada perusahaan mampu memberikan citra positif ditengah masyarakat dan pemerintah. Tulisan ini menempatkan bagaimana suatu kegiatan CSR yang dilakukan suatu perusahaan dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan, metodologi dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini melibatkan tiga desa antara lain Desa Padang Loang, Seppang dan Desa Bijawang dan sebanyak 45 informan antara pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat. Dari hasil penelitian secara umum bahwa perusahaan PT. Agung Perdana yang berdiri di Desa Padang Loang tidak pernah melakukan suatu kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang mereka lakukan hanya memikirkan keuntungan pada perusahaan serta banyak dampak negatif yang mereka berikan kepada masyarakat terutama pada kerusakan lingkungan itu sendiri, hanya ada satu indikator yang memberikan nilai positif pada perusahaan yaitu dalam peningkatan ekonomi, sebagian masyarakat setempat diberikan lapangan pekerjaan sebagai buruh lepas. Faktor yang menjadi tidak adanya suatu kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan adalah kurangnya pemahaman perusahaan tentang CSR itu sendiri, serta tidak adanya pengawasan dan langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan tuntutan pada perusahaan agar mau melakukan suatu tanggung jawab sosial terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan. Dari pemaknaan hasil penelitian, apakah perusahaan mampu menanggulangi dan mengurangi kerusakan lingkungan yang telah terjadi pada wilayah tersebut, ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah dan stakeholder dalam permasalahan CSR.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, CSR dan kerusakan lingkungan

I. PENDAHULUAN

Untuk mencapai lingkungan yang berkelanjutan salah satu upayanya adalah dengan mengintervensi sektor industri. Upaya memperbaiki keberlanjutan sektor

industri antara lain dilakukan melalui pendekatan sistem produksinya. Salah satu caranya adalah dengan mengetahui kontribusi sektor industri dalam upaya pengelolaan lingkungan, melalui bentuk investasi pengelolaan lingkungan. (Yulia, 2006)

Menurut (Yulia, 2006) faktor penyebab terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan lainnya disebabkan oleh berbagai aktifitas manusia. Manusia sebagai salah satu organisme atau makhluk hidup dalam sebuah ekosistem tentu memerlukan kehadiran organisme lainnya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut maka manusia melakukan sejumlah kegiatan yang justru berperan dalam kerusakan lingkungan di sekitarnya. Sebut saja penebangan pohon secara berlebihan, pembakaran hutan dalam rangka pembukaan lahan untuk bertani, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, terapi kejut juga bom, penggunaan bahan-bahan kimia yang berlebihan dalam pertanian, kebiasaan membuang sampah yang tak bisa diurai sampai ribuan tahun, aktifitas tertentu yang menghasilkan limbah kimia yang berbahaya bagi lingkungan seperti limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri dan masih banyak lagi lainnya.

Kegiatan pokok pemerintah dalam menghadapi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan ini sudah tertuang dalam UU. No. 23 Tahun 1997. Dalam kaitan ini, pemerintah mendorong upaya untuk pencegahan dan pemulihan, melalui strategi penataan ruang dan upaya pelestarian fungsi lingkungan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, seperti perizinan, pengawasan, sanksi administrasi dan audit lingkungan. Penerapan kebijakan mencakup kewenangan instansi sektoral dan daerah dan berbagai aspeknya, seperti tata ruang/ tata guna lahan, perisihan dan penerapan sanksi hukum, (Sugandhy, 2007).

Dalam hal ini, terdapat sebuah perusahaan PT. Agung Perdana di Desa Padang Loang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 2005 sampai saat ini tahun 2015. Perusahaan tersebut bergerak dibidang penambangan pasir dan batu kerikil.

Dalam berbagai informasi dari masyarakat bahwa, PT. Agung Perdana yang berdiri di desa Padang Loang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, sangat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan ekologi, dampak buruk yang dimaksud adalah banyaknya polusi udara seperti pencemaran udara diakibatkan banyaknya debu beterbangan di pemukiman warga hasil dari aktifitas perusahaan tersebut, seperti mengakibatkan keadaan jalanan raya mengalami kerusakan yang sangat parah, sepanjang jalan raya yang dilalui oleh truk-truk pengangkut batu dan pasir, jalanan menjadi berlubang sehingga mengganggu pengendara jalan yang melintasinya.

2. TINJAUAN TEORITIK

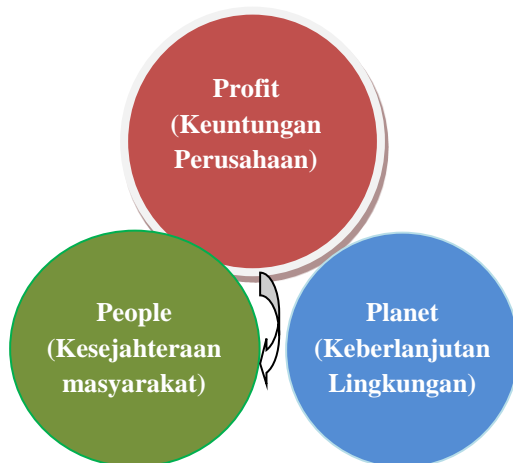
a. Konsep CSR

CSR, menurut *World Business Council For Sustainable Development (WBCSD)* merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi pada komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup karyawan beserta seluruh keluarganya. Diakses dari jurnal kementerian lingkungan hidup.

Menurut Carroll dalam (Unang, 2011) CSR, adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, meliputi beberapa aspek yaitu aspek ekonomi, hukum, etika serta kontribusi pada isu social. Dari konsep Carroll dalam (Unang, 1979) menunjukkan bahwa setiap perusahaan dalam bentuk kegiatannya CSR, harus melihat beberapa aspek karena dari beberapa aspek yang dikemukakan oleh Carroll itu bersifat memberikan kontribusi dalam kepedulian dan pengembangan terhadap beberapa aspek yang telah dijelaskan oleh Carroll.

Istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970an setelah John Elkington mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas juga *The World Commission on Environment and Development (WCED)* dalam *Brundtland Report (1987)*. Ditegaskan Elkington bahwa CSR dikemas dalam tiga focus yang disingkat 3P, singkatan dari profit, planet dan people. Penjabarannya, perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Gambar 1.1. Triple Bottom Line



Dari gambar di atas, dapat dipahami bila *profit* merupakan orientasi yang harus dikejar oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi agar usaha mereka dapat terus beroperasi dan berkembang. Kemudian, *people* diartikan perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia disekitar mereka beroperasi. Beragam model telah dijalankan pihak perusahaan dalam memberikan dana CSR, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal dan sebagainya. Sedangkan *planet*, dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian pihak perusahaan kepada lingkungan hidup.

b. Implementasi

Grindle, (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan (Grindle, 1980) mengatakan bahwa tugas implementasi adalah membangun

jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Menurut Lane dalam (Akip, 2015) menyatakan implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)*. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu (Sabatier, 1986)

Grindle, (1980) menjelaskan dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan 3) adanya hasil kegiatan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut, (Goggin,1990) keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok:

1. Isi kebijakan (*the content of the policy message*)
2. Format kebijakan (*the form of the policy message*)
3. Reputasi actor (*the reputation of the communicators*)

3. Sustainable Development

Menurut Brundtland dalam (Hadi, 2012) pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Dari sisi ekonomi Fauzi dalam (Jaya, 2004), setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. *Pertama* menyangkut alasan moral. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. *Kedua*, menyangkut alasan ekologi, keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, Oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.

Soemarwoto dalam ([Imawrai, 2011](#)) mengajukan enam tolak ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan baik untuk

pemerintah pusat maupun di daerah untuk menilai keberhasilan seorang kepala pemerintahan dalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan. Keenam tolok ukur itu meliputi:

1. Tolak ukur pro lingkungan hidup (*pro-environment*) dapat diukur dengan berbagai indikator. Salah satunya adalah indeks kesesuaian, seperti misalnya nisbah luas hutan terhadap luas wilayah (semakin berkurang atau tidak), nisbah debit air sungai dalam musim hujan terhadap musim kemarau, kualitas udara, dan sebagainya, Soemarwoto dalam ([Imawrai, 2011](#)).
2. Tolak ukur pro rakyat miskin (*pro-poor*) bukan berarti anti orang kaya. Yang dimaksud pro rakyat miskin dalam hal ini memberikan perhatian pada rakyat miskin yang memerlukan perhatian khusus karena tak terurus pendidikannya, berpenghasilan rendah, tingkat kesehatannya juga rendah serta tidak memiliki modal usaha sehingga daya saingnya juga rendah. Pro rakyat miskin dapat diukur dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dan indeks kemiskinan manusia (IKM) atau *Human Poverty Index* (HPI) yang dikembangkan PBB. Kedua indikator ini harus dilakukan bersamaan sehingga dapat dijadikan tolok ukur pembangunan yang menentukan. Nilai HDI dan HPI yang meningkat akan dapat menunjukkan pembangunan yang pro pada rakyat miskin, Soemarwoto dalam ([Imawrai, 2011](#)).
3. Tolak ukur pro kesetaraan jender/pro-perempuan (*pro-women*), dimaksudkan untuk lebih banyak membuka kesempatan pada kaum perempuan untuk terlibat dalam arus utama pembangunan. Kesetaraan jender ini dapat diukur dengan menggunakan *Genderrelated. Develotment .Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measure* (GEM) untuk suatu daerah. Jika nilai GDI mendekati HDI, artinya di daerah tersebut hanya sedikit terjadi disparitas jender dan kaum perempuan telah semakin terlibat dalam proses pembangunan, Soemarwoto dalam ([Imawrai, 2011](#)).
4. Tolak ukur pro pada kesempatan hidup atau kesempatan kerja (*pro-livelihood opportunities*) dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator seperti misalnya indikator demografi (angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja, dan sebagainya), pendapatan perkapita, dan lain-lain. Indikator kesejahteraan masyarakat juga dapat menjadi salah satu hal dalam melihat dan menilai tolok ukur ini, Soemarwoto dalam ([Imawrai, 2011](#)).
5. Tolak ukur pro dengan bentuk Negara kesatuan RI merupakan suatu keharusan, karena pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah untuk bangsa Indonesia yang berada dalam kesatuan NKRI, Soemarwoto dalam ([Imawrai, 2011](#)).
6. Tolak ukur anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat dilihat dari berbagai kasus yang dapat diselesaikan serta berbagai hal lain yang terkait dengan gerakan anti KKN yang digaungkan di daerah bersangkutan, Soemarwoto dalam ([Imawrai, 2011](#))

4. Lingkungan

Iuwita dalam (Soemarwoto, 2012) mengemukakan bahwa dalam bahasa Inggris istilah lingkungan adalah environment. Selanjutnya dikatakan, lingkungan atau lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme dan berpengaruh pada kehidupannya.

Menurut FAO masalah lingkungan di Negara-Negara berkembang sebagian besar disebabkan karena eksploitasi lahan yang berlebihan, perluasan penanaman dan penggundulan hutan, (Reyntjes, 1999). Soerjani dalam (Mardikanto, 1992) menjelaskan penyebab utama kerusakan lingkungan pertama adalah akibat ulah manusia dan yang kedua akibat alam, dalam hal ini [bencana alam](#). Tetapi penyebab akibat ulah manusia sangat tinggi dan besar pengaruhnya dibandingkan kejadian oleh alam yang tidak setiap hari terjadi. Lingkungan ekologi yang rusak tidak menyediakan lagi kondisi habitat yang sesuai bagi kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup seperti [hewan](#) akan berpindah mencari suatu tempat yang ideal agar kebutuhan hidupnya seperti [makanan](#), [minum](#) dan ruang hidup dapat terpenuhi. Menurut Wati (2014) faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Kerusakan lingkungan hidup faktor alam, bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup.
2. Kerusakan lingkungan hidup faktor manusia. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup.

Menurut (Hakim, 2013) untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan, manusia harus melakukan upaya pelestarian lingkungan. Beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menanam kembali hutan yang gundul.
2. Memperbanyak area hijau.
3. Mengatur pembuangan, pengelolaan, dan pendaur-ulangan sampah.
4. Menggunakan konsep "green building" ketika membangun bangunan.
5. Menghentikan dan menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam.
6. Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan
7. Melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
8. Mengajarkan dan mengkampanyekan pola hidup ramah lingkungan kepada masyarakat.

III. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini memakai tipe dan jenis penelitian yakni metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah

sebagai eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti berusaha mengamati dan mengungkap realitas yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan implementasi CSR PT. Agung Perdana dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan di Desa Padang Loang, Seppang dan Desa Bijawang, Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba.

IV. HASIL

1. Implementasi CSR PT. Agung Perdana dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan di kec, Ujung Loe desa padang loang, Seppang dan Desa Bijawang kab. Bulukumba.

Dari hasil penelitian secara umum PT. Dgung Perdana tidak melakukan tanggung jawab sosial atau CSR terhadap lingkungan. Dari hasil penelitian ini dengan 45 informan secara umum 99% mengatakan perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan CSR. Berikut hasil dari setiap indikator dalam implementasi CSR. 1) Tercapainya tujuan CSR dalam indikator ini secara garis besar tidak ada pencapaian tujuan CSR yang dilakukan perusahaan. 2) Adanya pemberdayaan ekonomi dan masyarakat, jika dilihat dari sudut pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar dipekerjakan sebagai buruh lepas tetapi dalam hal pemeberdayaan masyarakat tidak ada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan. 3) Adanya perhatian terhadap lingkungan dari hasil dilapangan perusahaan tidak mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dari fakta yang terjadi kerusakan lingkungan area tambang dan pemukiman mengalami kerusakan seperti dampak yang dihasilkan volusi udara, kerusakan jalan dan kerusakan lingkungan. 4) Adanya manfaat dari CSR bagi masyarakat sasaran dari indikator sebelumnya perusahaan tidak melakukan kegiatan CSR jadi manfaat CSR bagi masyarakat sasaran tidak ada. 5) Terjadinya komunikasi CSR yang baik antara perusahaan dengan masyarakat dan antar perusahaan dengan stecholder dari temuan dilapangan tidak ada komunikasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan dengan masyarakat dan stacholder selama ini yang dilakukan oleh perusahaan hal ini dibenarkan oleh bapak Marhalin selaku pemerintah desa Padang Loang sebagai berikut:

Sebelum saya menjabat sebagai kepala desa Padang Loang, pihak perusahaan tidak pernah melakukan tanggung jawabnya terhadap dampak yang dihasilkan. Tentang pencapaian CSR itu sendiri tidak ada kami disini setiap hari makan debu dan selama saya menjabat kepala desa selama ini sama saja tidak kegiatan yang bersifat tanggung jawab sosial. Saya pernah dialog sama pihak perusahaan tentang dampak yang dihasilkannya tapi kami juga tidak pernah direspon.

Jika dilihat dari pernyataan diatas memang perusahaan tidak melakukan tanggung jawab sosial (CSR). 6) Adanya sumber daya pelaksanaan CSR dari indikator ini tidak ada sumber daya yang disediakan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR. 7) Adanya kegiatan untuk sosialisasi dampak operasi perusahaan, dari hasil

temuan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap dampak kerusakan yang mereka lakukan. 8) Adanya program teknologi pengurangan dampak kerusakan dari hasil temuan tidak program teknologi yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi kerusakan dari fakta dilapangan yang terjadi lingkungan semakin rusak parah hal ini sesuai yang disampaikan oleh informan masyarakat secara umum sebagai berikut:

Yang saya lihat selama ini tidak ada kepedulian sosial terhadap lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, kondisi lingkungan kami menjadi rusak parah kami juga tidak mampu berbuat sesuatu.

Dari segi jawaban informan diatas secara umum tingkat kepedulian perusahaan memang tidak ada hanya dampak kerusakan lingkungan yang diberikan oleh masyarakat sekitar. 9) Adanya konfensasi terhadap kerusakan lingkungan, dari temuan dilapangan tidak ada konfensasi yang diberikan langsung oleh perusahaan kepada masyarakat pada sekitar wilayah tambang perusahaan.

2. Faktor-faktor penghambat CSR, PT. Agung Perdana dalam mengurangi dampak kerusakan ekologi di Kec, Ujung Loe Desa Padang Loang, Seppang dan Desa Bijawang Kab. Bulukumba.

Secara umum faktor penghambat dalam pelaksanaan CSR pada perusahaan adalah tidak adanya stacholder dan pemerintah yang menekan dan pemberian pemahaman kepada perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosialnya (CSR) kususnya pada bidang lingkungan hal ini sesuai dengan pernyataan oleh *manajer* perusahaan oleh Ibu Eni sebagai berikut:

Saya tidak mengerti tentang CSR selama saya menjabat 6 tahun sebagai manajer di perusahaan ini, saya tidak pernah mendengar kata CSR itu sendiri.

Dari pernyataan diatas bahwa perusahaan tidak mengerti tentang CSR itu sendiri, permasalahan inilah yang menghambat perusahaan untuk bergerak dalam melakukan kegiatan CSR karena ketidakpahaman perusahaan jika ada tuntutan yang harus dipenuhi dalam mengespolarasi suatu lahan tambang.

Namun ada beberapa temuan dilapangan ketidak sesuaian pernyataan dari manajer perusahaan antara ketua BLH Kab. Bulukumba berikut kutipan pernyataan dari bapak Abdul Rahman Ismail selaku ketua BLH sebagai berikut:

Selama ini perusahaan tersebut melakukan kegiatan CSR seperti penanaman pohon, dan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar perusahaan terutama salah satu penyumbang pajak daerah di Kab. Bulukumba.

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa tidak sesuai fakta dan realita yang terjadi di lapangan. Ungkapan dari pemerintah menunjukkan perusahaan melakukan kegiatan CSR namun pihak perusahaan sendiri tidak mengakui bahwa perusahaan mereka pernah melakukan kegiatan CSR. Dari pernyataan ini muncul spekulasi bahwa pemerintah menutupi keburukan perusahaan entah faktor apa yang mendorong pemerintah melakukan hal itu.

3. Faktor-faktor pendukung CSR, PT. Agung Perdana dalam mengurangi dampak kerusakan ekologi di Kec, Ujung Loe Desa Padang Loang, Seppang dan Desa Bijawang Kab. Bulukumba.

Jika dilihat dari faktor pendukung secara umum tidak ada faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan CSR pada perusahaan, karena perusahaan sendiri tidak pernah melakukan kewajiban-kewajibannya dalam melakukan tanggung jawab sosial baik dibidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap pihak informan dengan jawaban secara keseluruhan sama bahwa tidak adanya bentuk kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

V. ANALISIS

Dari beberapa indikator dalam implementasi CSR secara umum menunjukkan tidak adanya suatu pencapaian dan manfaat CSR yang dilakukan oleh perusahaan sehingga menimbulkan permasalahan sosial yang merugikan masyarakat, ekonomi dan lingkungan, hal ini terjadi karena tidak adanya suatu komunikasi, sosialisasi, dan program CSR yang dilakukan oleh antara perusahaan dan pemerintah kepada target sasaran sehingga menimbulkan dampak bencana bagi masyarakat sekitar wilayah tambang perusahaan, selain besarnya dampak yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, tidak adanya suatu kompensasi yang diberikan secara langsung kepada masyarakat terkait dengan ganti rugi terhadap dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Kita tau bahwa CSR merupakan program yang wajib dilakukan oleh perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan. CSR sangat berguna bagi perusahaan antara lain dapat memberikan citra positif perusahaan bagi masyarakat, memperbaiki hubungan dengan regulator selain itu melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial yang terjadi dilapangan pemerintah terbantu dalam hal pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi pada masyarakat.

VI. KESIMPULAN

Perusahaan PT. Agung Perdana memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam mengelola bisnis dengan cara melakukan program kegiatan CSR yang berbasis community development, Melihat temuan dilapangan bahwa tidak adanya pencapaian CSR yang dilakukan perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial terhadap impact yang dihasilkan terutama pada lingkungan, CSR berpengaruh besar dalam memberikan nilai positif terhadap pemberdayaan masyarakat peningkatan ekonomi dan keselamatan lingkungan.

VII. IMPLIKASI

1. Perlunya pemerintah, LSM dan stecholder dalam memberikan pengawasan dan pemahaman kepada perusahaan tentang pentingnya penerapan kegiatan CSR bagi perusahaan, melihat dampak yang dihasilkan dalam aktifitas perusahaan.

2. Perlunya perusahaan melakukan tanggung jawab sosial (CSR) terhadap pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi terutama pada keselamatan dan keseimbangan lingkungan.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

- Grindle Meriles s.1980. *politics and policy implementation in the thaird world*, princnton university press, new jersey.
- Hakim, (2014) artikel “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Faktor Recovery Ekonomi”.
- Haedar Akip dan Antonius Tarigan (2015). “Artikulasi konsep implementasi kebijakan” *Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*” Jurnal [Onlinehttp://carapedia.com/](http://carapedia.com/) Diakses pada 6 april 2005.
- Mardikanto Totok (2014). *Corporate Social Responsibility Tanggung Jawab Sosial Korporasi.* Alfabeta Bandung.
- Juwita, (2012) “**Definisi lingkungan hidup menurut para ahli**” diakses Artikel <http://juwitaismyname.blogspot.com/2012/07/lingkungan-hidup-menurut-beberapa-ahli.html> diakses pada 2 juli 2015.
- Sugiyono, (2013). “*Metode Penelitian Pendidikan*”. Bandung: Alfabeta.
- Imawrai, (2011) Artikel “*pembangunan berkelanjutan (sustainable development* diakses <http://imawrai.blogspot.com/2011/10/pembangunan> pada 15 juni 2015.
- Peppy Yulia, (2006). “*Identifikasi bentuk-bentuk investasi pengelolaan oleh sector industry*” Jurnal ilmiah perencanaan wilayah dan kota Universitas Deponegoro Semarang.
- Sugandhy dan hakim rustan. (2002) “*Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan*”.Jakarta Bumi Aksara.
- Unang Mulkhan (2011) “*Peran Pemerintah dalam Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Upaya Mendorong Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*.”Jurnal, ilmiah Administrasi Publik, Vol.2, No.1
- Hadi Wahyono, (2012) Artikel “*Sustainable Development (Pengembangan Berkelanjutan)*” diakses <https://damarlanhadi.wordpress.com/2012/12/14/sustainable-developmen>. Pada 15 juni 2015.